



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)
UNIT KERJA : BADAN PELAKSANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SULISTYOWATI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 910795

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN		Rp.	10.650.000.000
1.	Tanah dan Bangunan Seluas 355 m ² /200 m ² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000		
2.	Tanah dan Bangunan Seluas 364 m ² /170 m ² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000		
3.	Tanah dan Bangunan Seluas 84 m ² /36 m ² di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN		Rp.	815.000.000
1.	MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
2.	MOBIL, BMW X5 XDRIVE351 CKD AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
3.	MOBIL, BYD MOBIL PENUMPANG ME-60 (4X2)AT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	405.000.000
D. SURAT BERHARGA		Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	515.150.176
F. HARTA LAINNYA		Rp.	---
Sub Total		Rp.	12.385.150.176
III. HUTANG		Rp.	1.507.947.254
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	10.877.202.922



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.